

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media:	Radar Sampit	Halaman: 16
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Elektronik	Palangka Post	Tabengan

Pemerintah Daerah Didorong Pertahankan Opini WTP

PALANGKA RAYA, PPOST

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Abdul Razak, mendorong pemerintah daerah (pemda) di provinsi setempat, untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dorongan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut Razak sampaikan, sejalan dengan kegiatan penyampaian pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Opini WTP yang selama ini sudah tercapai berturut-turut harus bisa dipertahankan. Caranya dengan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah," katanya, kemarin di Palangka Raya.

Razak mengatakan, Pemprov Kalteng selama ini selalu mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI, dan diharapkan juga pemerintah

berkomitmen mempertahankannya dengan meningkatkan pengelolaan keuangan.

Sementara itu dalam kegiatan secara nasional tersebut Presiden telah memberi banyak penekanan. Salah satunya mengingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipergunakan secara cermat dan bertanggungjawab karena merupakan uang rakyat.

"Jadi, mempertahankan prestasi opini WTP yang selama ini diraih berturut-turut, tentu harus disertai dengan komitmen dari semua pihak. Pada intinya anggaran dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat," ucap Razak.

Politikus senior dari Partai Golkar ini menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik, tentu akan berdampak positif terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan daerah. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dipergunakan harus terencana, terukur dan bertanggungjawab

"Menjadi keharusan pemerintah provinsi memerhatikan hal-hal penting terkait pengelolaan keuangan. Tidak sekadar berupaya meraih opini WTP, namun harus memiliki komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan Kalteng," pungkasnya. (fys/P5)